

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KECAMATAN MEDANG DERAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

NAMA : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata – 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangannya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 01 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperbincang, dan secermatnya:

MEMUTUSKAN

Nama : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Ujian Akhir : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN MEDANG DEAS

Dinyatakan (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(SURYA SANJAYA S.E., M.M)

Pembimbing

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KECAMATAN MEDANG
DERAS

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan, Juli 2024

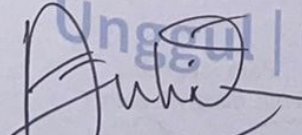
Pembimbing

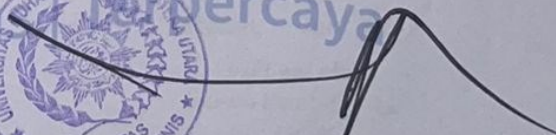
M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si


Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN MEDANG DERAS

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Mendiskusikan - Pembahasan - Pendahuluan dan	8/1-2024	
BAB 2	Penyusunan - Kerangka - Litteatur	5/2-2024	
BAB 3	Metodologi - Campi.	20/2-2024	
BAB 4	Pembahasan.	12/6-2024	
BAB 5	Kesimpulan	19/6-2024	
Daftar Pustaka	Mendiskusikan.	20/6-2024	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang.	22/6-2024	

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, Juni 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

ASSOC. PROF. DR. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN MEDANG DERAS

Wiwi Tresya Pardede

Program Studi Akuntansi

E-mail: wiwitretyapardede@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara langsung terhadap pembangunan desa, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara langsung terhadap partisipasi masyarakat, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas kerja secara tidak langsung terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan sampel sebanyak 72 responden yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Medang Deras. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner dan teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (SmartPLS). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Pembangunan Desa

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS ON VILLAGE DEVELOPMENT WITH COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT AS AN INTERVENING VARIABLE IN MEDANG DERAS DISTRICT

Wiwi Tresya Pardede

Accounting Study Program

E-mail: wiwitresyapardede@gmail.com

The purpose of this research is to identify and analyze the direct influence of transparency, accountability, and community participation on village development, to identify and analyze the direct influence of transparency and accountability on community participation, and to identify and analyze the indirect influence of transparency and accountability on village development through community participation. This research employs an associative approach with a sample size of 72 respondents, who are village officials in Medang Deras District. Data collection techniques include questionnaires, and data analysis techniques use Partial Least Square (SmartPLS). The results of the study show that transparency, accountability, and community participation have a positive and significant influence on village development. Transparency and accountability have a positive and significant influence on community participation. Transparency and accountability have a positive and significant influence on village development through community participation.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Development*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya. Karena karunia dan rahmat-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras”**.

Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Ayahanda tercinta Sahlan Pardede dan Ibunda tersayang Misda Butar-Butar, yang selalu mendoakan, penyemangat, kasih sayang yang diberikan, perhatian, motivasi dan nasehat serta dukungan baik secara finansial sehingga penulis dapat memperoleh pendidikan dan gelar (S-1) akuntansi .

Serta kepada pihak-pihak telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si., MCA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Akuntansi C Pagi stambuk 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak M. Firza Alpi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh para staf pegawai di kantor Desa, Kecamatan Medang Deras yang telah memberikan izin tempat riset dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Cinta Kasih Ketiga saudara-saudara saya, Kakak Terbaik Estyh Melati Pardede S.Si, Adek Tersayang Erlangga Pardede dan Ryansah Pardede yang telah banyak memberikan semangat, Motivasi serta hiburan kepada Penulis.
11. Teman teman dekat saya Osinta Br Tarigan, Irda Elyana Sutami, dan Siska Adilah Harahap yang selalu menyemangati saya dalam menyusun proposal ini.

12. Seluruh teman teman penulis dari kelas C Akuntansi Pagi dan kelas A Akuntansi malam stambuk 2020, semoga kita akan sukses semuanya.
13. Terakhir diri saya sendiri, Wiwi Tresya Pardede atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu segala proses penyusunan skripsi ini dan juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin ...

Medan, Juni 2024
Penulis,

Wiwi Tresya Pardede
2005170143

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecamatan Medang Deras adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Pangkalan Dodek. Kecamatan Medang Deras mempunyai 18 desa diantaranya: Desa Aek Nauli, Durian, Lalang, Medang, Pakam, Pakam Raya, Pematang Cengkering, Sei Buah Deras, Sei Rakyat, Sidomulyo, Tanjung Sigoni, Nenas Siam, Pakam Raya Selatan, Mandarsah, Medang Baru, Pematang Nibung, Cengkering Pekan, Sei Raja.

Desa merupakan sebuah komunitas dalam lingkungan yang kecil dan terikat pada lokalitas tertentu sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup keseharian masyarakat desa yang bergantung pada bidang pertanian (Saragih & Alpi, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. (Zakariya, 2020) Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi mengelolanya sesuai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang

terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019(CNN Indonesia, 2019). Kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah membuat rakyat ragu, apakah pemerintah dapat dipercaya untuk mengelola dana desa. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara lain informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai (Krina, 2013).

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika, yaitu sebuah objek transparan atau objek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi didalam jabatan yang di embannya (Raja & Amanah, 2021).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

(Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022) Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus

menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “accountability” yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Tetlock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggung jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Alpi, 2019a). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009) & (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019).

Akuntabilitas dapat menjadi kepercayaan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Pertanggungjawaban dana desa juga memberikan wadah pada masyarakat desa untuk berpartisipasi secara langsung maupun aktif untuk melaksanakan pengawasan dan pembangunan, sehingga dalam proses tersebut dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Sementara itu, Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan(Ibrahim et al., 2020). Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat bervariasi, dan dalam konteks dana desa, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dana(Hasmarini Ariestin Waruwuet al., 2023).

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga mencakup pengidentifikasian masalah dan potensi dalam masyarakat. Partisipasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan berikutnya (Sub-district & Regency, 2024)

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Medang Deras merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan tersebut memiliki 18 Desa yaitu Desa Aek Nauli, Durian, Lalang, Medang, Pakam, Pakam Raya, Pematang Cengkering, Sei Buah Deras, Sei

Rakyat, Sidomulyo, Tanjung Sigoni, Nenas Siam, Pakam Raya Selatan, Mandarsah, Medang Baru, Pematang Nibung, Cengkering Pekan, Sei Raja.

Table 1.1 Penyaluran Dana Desa Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2024

NO	Wilayah/ Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran Ke RKD	Persentase Total Penyaluran
1	Aek Nauli	Rp941.510.000	Rp306.753.000	32.58%
2	Durian	Rp784.079.000	Rp255.023.700	32.53%
3	Lalang	Rp1.253.436.000	Rp439.030.800	35.03%
4	Medang	Rp1.103.825.000	Rp372.547.500	33.75%
5	Pakam	Rp820.204.000	Rp268.585.000	33.74%
6	Pakam Raya	Rp775.509.000	Rp252.452.700	32.55%
7	Pematang Cengkering	Rp782.716.000	Rp254.614.800	32.53%
8	Sei Buah Keras	Rp1.373.093.000	Rp461.427.900	30.50%
9	Sei Rakyat	Rp801.957.000	Rp261.287.000	32.58%
10	Sidomulyo	Rp885.270.000	Rp288.081.000	28.11%
11	Tanjung Sigoni	Rp706.270.000	Rp234.381.000	33.19%
12	Nenas Siam	Rp1.086.438.000	Rp353.831.400	32.57%
13	Pakam Raya Selatan	Rp775.509.000	Rp252.452.700	32.55%
14	Mandarsah	Rp741.345.000	Rp251.203.500	33.88%
15	Medang Baru	Rp647.642.000	Rp210.492.000	32.50%
16	Pematang Nibung	Rp787.479.000	Rp284.843.700	36.17%
17	Cengkering Pekan	Rp725.115.000	Rp241.834.500	27.97%
18	Sei Raja	Rp725.626.000	Rp236.587.800	32.60%
Ringkasan		Total	Total	Rata – Rata
		Rp15.828.645.000	Rp5.272.393.500	32.45%

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id>

Dari Tabel 1.1 Dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa di Kecamatan Medang Deras di tahun 2023-2024 Total pagu anggaran sebesar Rp15.828.645.000, dan dari beberapa desa di Kecamatan Medang Deras jumlah dana desa yang tertinggi di peroleh oleh Desa Sei Buah Keras yakni sebesar Rp1.373.093.000, yang merupakan desa yang mendapatkan jumlah dana terbesar

atau dapat dikatakan desa yang mendapatkan dana yang paling banyak dibandingkan dengan desa lainnya. Sedangkan jumlah dana desa yang terendah di peroleh oleh Desa Tanjung Sigoni yakni sebesar Rp706.270.000.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, kebijakan penyaluran dana desa tahun 2020 secara reguler dilakukan 3 tahap. Tahap pertama, 40 persen disalurkan paling cepat Januari, paling lambat Juni. Persyaratan yang dibutuhkan pada tahap pertama ini antara lain peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tatacara pengalokasian dan rincian dana desa per desa, dan Peraturan Desa (perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap kedua, sebesar 40 persen disalurkan paling cepat maret, paling lambat Agustus. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan pada tahap kedua ini adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Tahun Anggaran (TA). Tahap ketiga, sebesar 20 persen disalurkan paling cepat Juli.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam kegiatan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Medang Deras, Desa Aek Nauli yaitu di duga salah satu kades tindak pidana korupsi dalam penggunaan APBDes pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp118.610.000 (Antara News Sumatra Utara, 2023). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa, Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis,

terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Namun Permasalahan lainnya yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada desa Medang yaitu terkait dengan dugaan korupsi dana taruna oleh kepala desa Medang tahun anggaran 2020 sebesar Rp18.000.000 (Pojok redaksi.com 2021). Dana desa termasuk didalamnya terdapat dana desa, wajib dilaporkan dan dipertanggung jawabkan, berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh (Defi Purnamawati Saragih) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Serba Jadi”. Hasil penelitian ini Partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Tata kelola dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Tata kelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan, Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan, Partisipasi masyarakat melalui akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, Tata kelola dana desa melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, jumlah respondennya dan permasalahan yang berbeda pula yang di temukan di lokasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa, Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga salah satu kades melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan APBDes.
2. Kurangnya transparansi perangkat desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.
3. Kurangnya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana terhadap pembangunan desa pada tahun 2019-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras ?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Medang Deras ?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Serba Jadi?
5. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras?
6. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening pada Kecamatan Medang Deras?
7. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat Kecamatan Medang Deras
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti sebagai langkah awal dalam mengaplikasikannya ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap pembangunan desa.
2. Bagi pihak Kantor Desa pada Kecamatan Medang Deras Sebagai bahan masukan bagi instansi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.
3. Bagi peneliti lain untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan tindakan atau aksi dari pihak-pihak yang terlibat adanya hubungan kontrak dalam merubah metode pengukuran akuntansi, khususnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau manajemen (Abdurrahman dan Ludigdo, 2004: 249). Definisi tersebut menunjukkan adanya suatu kontradiksi dalam agency theory yang diakibatkan adanya konflik kepentingan antara pemilik (principal) (agent). dan manajer Untuk itulah dalam uraian berikut ini akan dibahas tentang konsepsi akuntabilitas, kemudian agency theory, sebagai awal timbulnya isu tentang keterbatasan agent akuntabilitas, konseptual dan principal yang berhubungan dengan akuntabilitas (Kholmi, 2010).

Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah kan pihak lain (agen) untuk melakukan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian kepada agen dari beberapa otoritas pembuatan keputusan. Ketika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk memaksimalkan nilai mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak - pihak yang terlibat dalam kontrak. Berkaitan mengenai teori agensi dengan penerimaan opini audit

going concern adalah bahwa agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari laporan pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan tersebut, nantinya akan menghasilkan laporan kondisi keuangan perusahaan dan digunakan oleh prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. (Sofyan et al., 2019) & (Nissa, F., Astuti, W., & Sari, E. N. (2022).

Teori agensi berfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen, prinsipal mendelegasikan responsibility desicion making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian manajemen akuntansi, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan manfaat principal (Olson & Wu, 2015).

Korelasi penelitian ini dengan agency theory adalah bahwa pemerintah bertindak selaku agent atau pengelola, berkewajiban memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, serta melaporkan kepada masyarakat selaku principal atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Dilago, et al. (2018), transparansi adalah keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi. Sedangkan menurut Ramadanis (2019), transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (Cahyaningrum, F. M., & Ariani, K. R. (2022).

Transparansi Kepemerintahan setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah, terdapat lima jenis opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) disclaimer of opinion (Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020).

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh HumanitarianForum Indonesia (HFI) yaitu

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat (Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah informasi yang akurat

2.1.2.3 Indikator Transparansi

Menurut (Dwiyanto) menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yang pertama; mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme/prosedur pelayanan yang harus dipenuhi (Irawan, 2018).

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan good governance. Dwiyanto (2009 : 98) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat di pertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blamewortiness), dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik (Djalil, 2014:3) & (M. S. Sari & Zefri, 2019).

Akuntabilitas salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan, bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2002a). Ekonomis berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. (Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018).

2.1.3.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai yang dikemukakan oleh Sari (2017), Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Selain itu, (Sigit, 2020) menyatakan bahwa Dana Desa diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dijelaskan juga bahwa penyaluran Dana Desa mempunyai 5 tujuan yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua, mengentaskan kemiskinan; ketiga, memajukan perekonomian desa; keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Variabel Dana Desa sudah banyak di teliti oleh peneliti

sebelumnya di antaranya adalah(Sigit, 2020) (Hardianto, 2022).

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui cara-cara berikut:

- 1) Penyiapan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan benar. Menyusun Komite Audit dan Komite Risiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan.
- 2) Menyusun dan meredefinisi tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis mendasarkan pada best practices sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit namun juga menggunakan pendekatan risk based audit.
- 3) Memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- 4) Menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan penghukuman (reward and punishment system).
- 5) Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan profesional (Widanti, N. P. T. (2022).

2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat Pendukung Indikator :

- 1) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- 2) Mekanisme pertanggungjawaban
- 3) Laporan tahunan
- 4) Laporan pertanggungjawaban
- 5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- 6) Sistem pengawasan
- 7) Mekanisme reward and punishment. (Paramma, E. J. (2023))

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.(Pidarta, 2009)

2.1.4.2 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Menurut (Carter Santoso, 2005:2),menyebutkan manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
- 2) Meningkatkan proses belajar
- 3) Meneliminir perasaan terasing
- 4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- 5) Menciptakan kesadaran politik
- 6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.

Ketika membicarakan partisipasi masyarakat sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal Terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan desa itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah perubahan

dalam sikap dan tindakan masyarakat. (Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019)

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Department for International Development (DFID) dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif (Sumampouw, 2004), prinsip-prinsip partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership), berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility), berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan (Empowerment), keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui

keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- 7) Kerjasama, diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang
- 8) berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. (Korwa, J. C. (2020))

2.1.4.4 Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan juga ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. (Makalalag et al., 2017). Kejelasan sasaran dana desa adalah wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya (Nissa, F., Astuti, W., & Sari, E. N. (2022)).

(Husein, H., & Warandi, S. (2020) Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1) Perencanaan

Penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang memiliki kekuatan hukum. 21 RKPDesa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- b) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
- i) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2) Pelaksanaan

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- h) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- j) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

k) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara dan Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

4) Penatausahaan

Penatausahaan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahaa desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara Desa

merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan di tingkat desa.

Penatausahaan desa dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Penatausahaan Pendapatan (Penerimaan) Dalam penatausahaan penerimaan pendapatan desa, bendahara membuat dokumen yaitu buku kas umum, buku kas harian pembantu, dan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.
- b) Penatausahaan Belanja (Pengeluaran) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Perdes tentang APB Desa atau Perdes tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)

2.1.4.4.1 Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola berdasarkan praktikpraktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Armaini, 2017)

2.1.4.4.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa prinsip dana desa dalam mengatur pengelolaan dana desa menurut Roberto et al. (2015) yaitu:

- 1) seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa dilaksanakan dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,
- 2) segala aktivitas harus akui menurut manajerial, umum serta undang-undang,
- 3) dalam penggunaan dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomis, terarah serta teratur,
- 4) kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dalam menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat harus dilakukan dengan transparan yakni diputuskan lewat musyawarah.
- 5) proses penganggaran dana desa wajib mengikuti mekanisme yang berlaku dan ditulis di APBDesa. (Dzulkifli et al., 2023)

2.1.4.4.3 Faktor – faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat, kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan dana adalah mendorong peningkatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan dana desa pada desa Wonorejo berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.(C. K. Putra et al., 2012)

2.1.4.4.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengelolaan dana desa dengan tepat sasaran
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDesa
- 3) Penatausahaan atau pembukuan dana desa yang sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pelaporan pengelolaan dana desa kepada Bupati/Walikota
- 5) Pertanggungjawaban kepala desa atas realisasi APBDesa.(Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022)

2.1.5 Pembangunan Desa

2.1.5.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desakota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Helmy, 2004). (Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020)

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu desa menuju arah yang bijaksana. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan, meliputi:

- 1) Pengembangan ekonomi lokal
- 2) Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Pembangunan prasarana dan sarana, dan
- 4) Pengembangan Kelembagaan (Setiawati, L. C. (2020).

2.1.5.2 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, pembangunan desa bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Djiwadono (1981) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- 1) Meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- 2) Sosial di arahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- 3) Cultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- 4) Kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usahausaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.(Nurman: 2015)
(Murni, S., Analiansyah, A., & Baihaqqi, B. (2020)

2.1.5.3 Indikator Pembangunan Desa

(Adib, M. (2021) Istilah pembangunan desa sering diidentikkan dengan pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan banyak pedesaan (terutama di Negara berkembang) mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun sejatinya indikator pembangunan desa tidak hanya pada pembangunan pertanian saja. Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa, indikator pembangunan ekonomi pada desa diantaranya adalah.

1) Infrastruktur Desa Yang Baik

Hal pertama yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri terutamanya di akses jalan di sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah dilalui berbagai macam kendaraan namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan besar. Padahal akses jalan sangatlah penting untuk menentukan kemajuan sebuah desa. Dimana dengan akses jalan yang mudah dilalui maka logistik atau barang-barang penduduk desa akan mudah di penuhi. Sebaliknya akses jalan yang sulit akan membuat logistik sulit untuk masuk di desa tersebut.

2) Fasilitas Umum Yang Memadahi

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa tentunya harus di dukung pula dengan fasilitas yang memadahi dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadahi, sekolah, puskesmas dan lain sebagainya.

3) Akses Informasi

Salah satu pendukung perkembangan ekonomi desa adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa karena penduduk desa bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya. Sehingga apa yang sudah berhasil di tempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut. Indikator perkembangan ekonomi desa bisa dilihat bagaimana informasi yang masuk di desa itu. Apakah sudah baik atau belum, sangat jarang ditemukan sebuah desa dengan akses informasi yang minim namun bisa berkembang

dengan pesat. Sebaliknya desa yang memiliki akses informasi mudah maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu akses informasi sangat penting untuk dimiliki. Akses informasi tidak hanya terbatas dari satu tempat saja, melainkan bisa dari pemerintahan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahan atau dari satu desa ke desa lainnya dan dari berbagai pihak lainnya.

4) Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

5) Pendapatan Penduduk

Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah dari pendapatan dari penduduk tersebut. apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata. Desa dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup. Itulah beberapa indikator pembangunan ekonomi desa yang bisa dilihat dari beberapa aspek. Untuk mewujudkan desa yang berkembang dan maju tentunya dibutuhkan kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak dari desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Saragih & Alpi, 2023)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Serba Jadi	<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Tata kelola dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan, Tata kelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan, Partisipasi masyarakat melalui akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Tata kelola dana desa melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
2.	Rizky Amelia Sugista	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> mengungkapkan transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukakan oleh masyarakat berpengaruh positif pada

		Pembangunan Desa Pada Kabupaten Lampung Selatan	<p>pembangunan desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. akuntabilitas pengelolaan dana desa pengaruh positif pada pembangunan desa 3. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif pada pembangunan desa
3.	(Fitri & Alfi, 2019)	Pengaruh Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 3. Secara simultan dan Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa
4.	Gema Midata Pebrianti (2021) Jurnal	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sumabito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat 2. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan Masyarakat

5.	Baydatul Komariah, Yuniorita Indah Handayani, Mainatul Ilmi (2023) jurnal	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Pakusari Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. akuntabilitas,efektivitas dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa 2. transparansi berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa 3. pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa 4. akuntabilitas, tranparansi dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa 5. partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa
----	---	---	--

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka Berpikir Konseptual adalah variabel-variabel yang saling berhubungan antar variabel satu dengan variabel lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan dan menghubungkan secara panjang lebar tentang topik yang dibahas untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variabel indenpenden yaitu partisipasi masyarakat dan tata kelola dana desa, dengan variabel dependen yaitu Pembangunan desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

2.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak

lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan (Sugista, 2017).

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa

Menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari peyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab sebuah pimpinan selaku pemilik wewenang untuk mengelola sumberdaya publik. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab

utama.(Dewi & Sapari, 2020)

2.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Transparansi adalah suatu prinsip yang dapat menjamin kebebasan dalam mengakses dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah oleh setiap masyarakat Sujarweni (2015). Djumadi dan Paranoan (2015), dalam penelitian menyebutkan bahwa analisis faktor-faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa yang menunjukkan bahwa transparansi dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah desa (Firdaus et al., 2020).

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat bervariasi, dan dalam konteks dana desa, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dana (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023). Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga mencakup pengidentifikasian masalah dan potensi dalam masyarakat. Partisipasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan berikutnya. Pada konteks ini, konsep "bottom-up" yang terlihat dalam pengelolaan dana desa menunjukkan adopsi prinsip-prinsip pembangunan dari bawah. Ini sesuai dengan teori pembangunan bawah ke atas yang menekankan bahwa pembangunan yang berhasil dimulai dengan memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.(Sub-district & Regency, 2024).

2.3.4 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Akuntabilitas pada dana desa merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa selaku pelaku administrasi dan juga pengelola dana desa Putri et al., (2021). Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa dapat digunakan secara efektif, efisien dan terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana.

Hasil penelitian yang dilakukan Syafii et al.,(2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat diperkuat oleh Yupita & Juita,(2020) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat .(Amari, 2023)

2.3.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasi permasalahan dan potensi yng ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012). Partisipasi masyarakat juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi (Adi, 2007:27)(Umaira & Adnan,

2019)

Pelaksanaan untuk kemajuan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dari perencanaan, diharapkan kebutuhan dan ide masyarakat dapat disalurkan dan dipenuhi dengan baik.(Akuntansi et al., 2024)

2.3.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa melalui Partisipasi Masyarakat

Transparansi, aspek penting yang dapat mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik dan dapat memajukan desa. Menurut hasil penelitian Siregar (2020), Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan desa.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer dan tahap akuntabilitas juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa.(Transparansi et al., 2023)

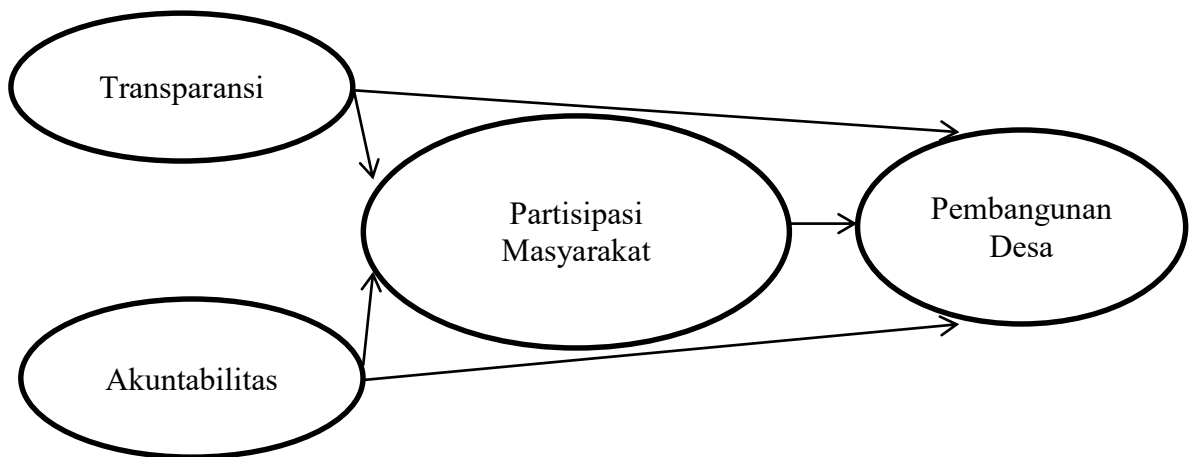
2.3.7 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa melalui Partisipasi Masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian yang dilakukan Atmadjaya dan Saputra (2018), dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang

dipercayakan kepadanya. Pengelolaan keuangan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Tumbel, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Kazimoto (2013) yang menyatakan laporan keuangan yang dihasilkan dan didistribusikan kepada anggota masyarakat tidak menunjukkan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan keuangan telah melibatkan masyarakat. Penelitian Kazimoto (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum memiliki efek positif bagi kinerja organisasi. (IRMA, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening yang dapat di gambarkan ke dalam bentuk paradigma penelitian dengan skema kerangka konseptual pada gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.
3. Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.
4. Akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.
5. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.

6. Transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras
7. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Menurut Juliandi dan Irfan (2013, hal.14) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan variabel lain, atau apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya, atau apakah suatu variabel menjadi sebab perubahan variabel lainnya. Alasan memilih penelitian asosiatif sebagai metode penelitian disebabkan karena untuk meneliti data yang bersifat hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan tidak secara mendalam, umumnya menyelidiki permukaannya saja, dengan demikian memerlukan waktu relatif lebih singkat.(Caniago, 2020).

3.2 Definisi Operasional

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:122) definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang di amati yang memungkinkan peneliti melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Nurdin dan Hartati (2019:122) menambahkan bahwa proses mendefinisikan berarti menggambarkan variabel dengan sedemikian rupa sehingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna atau tidak memiliki makna ganda.(Hartati & Nurdin, 2019).

Tabel 3.1. Definisi Oprasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Tranparansi Dana Desa (X1) (Nurlailah et al., 2020)	Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan 2. Pertanggungjawaban 3. Akuntabilitas 4. Pelaporan 	Likert
2.	Akuntabilitas Dana Desa (X2) (Amari, 2023)	Akuntabilitas (Accountibility) adalah sebuah pertanggungjawaban untuk memberikan jawaban atas dana yang dianggarkan, yang bisa mengindikasikan hasil kinerja seseorang maupun organisasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditunjuk oleh para pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pertanggungjawaban 3. Pelaksanaan 4. Pelaporan 	Likert
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Z) (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019)	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang diadakan pemerintahan, hingga memiliki dampak dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja pemerintah serta meminimalkan penyelewengan kewenangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. 3. Kesempatan masyarakat dalam melakukan penilaian. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa. 	Likert
4.	Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan desa merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, nelayan, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Sesuai manfaat 4. Pengawasan 	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini di rencanakan di mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan selesai, dan dapat di lihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Penyusunan proposal		■	■	■																
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■												
4	Seminar proposal							■	■												
5	Penyusunan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang meja hijau																		■	■	■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Sedangkan menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012) mengatakan bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Medang Deras yang berjumlah 18 desa.

Tabel 3.3. Jumlah Populasi

NO	Wilayah/ Desa
1	Aek Nauli
2	Durian
3	Lalang
4	Medang
5	Pakam
6	Pakam Raya
7	Pematang Cengkering
8	Sei Buah Keras
9	Sei Rakyat
10	Sidomulyo
11	Tanjung Sigoni
12	Nenas Siam
13	Pakam Raya Selatan
14	Mandarsah
15	Medang Baru
16	Pematang Nibung
17	Cengkering Pekan
18	Sei Raja

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Menurut (Sugiyono, 2019) metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. menyatakan bahwa sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 18 desa yang masing masing menggunakan 4 orang responden dengan total 72 responden. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Bendahara
4. Administrasi Desa

Alasan pemilihan responden adalah dikarenakan Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa, dan Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa. Dan Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi, Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya, Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan. Dan Bendahara Desa membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa

lainnya, Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan Pengurusan administrasi keuangan. Sedangkan Administarasi Desa bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. menyusun rencana APB Desa, dan menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian.

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada seluruh responden dengan teknik survei mandiri yaitu metode pengumpulan data primer, dalam hal ini responden diminta untuk mengisi jawaban sendiri pada kuesioner yang diberikan. Kuesioner adalah teknik penelitian dengan menyebarkan angket, sehingga dalam waktu relative singkat dapat menjangkau banyak responden (Saputra, 2014). Kuesioner digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan tata kelola dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening pada kecamatan medan deras.

2. Metode wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, yaitu penentuan skor. Hal ini dilakukan karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan menetapkan skor pada masing-masing jawaban. Skala yang digunakan dalam penentuan skor adalah skala *likert*. Pada skala likert pilihan jawaban yang tersedia adalah SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidaak Setuju) yang masing-masing diberikan skor sebagai berikut :

Tabel 3.4. Skor Skala Likert

Pernyataan Jawaban	Sekor
SS (Sangat Setuju)	5
S (Setuju)	4
KS (Kurang Setuju)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidaak Setuju)	1

3.6 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya dan dideproposalkan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian di jabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan darahkan untuk mendiprosalkan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik yakni *structural*

equation model-partial least square (SEM-PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis *multivariate* (Ghozali, 2013). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan *software Smart PLS ver. 3 for Windows*. Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu (1) analisis model pengukuran (*outer model*), yakni *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *cronbach alpha* (2) analisis model struktural (*inner model*), yakni *R-square*; *F-square*;

pengujian hipotesis. Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Menurut (Juliandi, 2018) Analisis model pengukuran/*measurement model analysis (outer model)* menggunakan dua pengujian, antara lain: *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *cronbach alpha*.

1) *Convergent Validity*

Berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Ghozali, 2013). Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang diukur. Namun menurut (Ghozali, 2013) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

2) *Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. (Ghozali, 2013) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur *reliabilitas component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

3) *Cronbach Alpha*

Cronbach alpha harus > 0.70 untuk *confirmatory research*, dan > 0.60 masih dapat diterima untuk *exploratory research* (Hair et al., 2021).

4) *Composite Reliability*

Composite reliability harus > 0.70 untuk *confirmatory research*, $0.60-0.70$ masih dapat diterima untuk *exploratory research* (Hair et al., 2021).

3.7.1 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural (*inner model*) biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisis model struktural (*inner model*) menggunakan dua pengujian antara lain (1) *R-square*; (2) *F-square*; (3) pengujian hipotesis yakni (a) *direct effect*; (b) *indirect effect*; dan (c) *total effect*. (Juliandi, 2018).

3.7.1.1 *R-Square*

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Kriteria dari *R-Square* adalah: (1) jika nilai (adjusted) = $0.75 \rightarrow$ model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai (adjusted) = $0.50 \rightarrow$ model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai (adjusted) = $0.25 \rightarrow$ model adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018).

3.7.1.2 *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak *relative* dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (*F-square*) disebut

juga efek perubahan. Artinya perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018).

Kriteria *F-Square* menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen; (2) Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan (3) Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

3.7.1.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis (*hypotesis testing*) mengandung tiga sub analisis, antara lain: (a) *direct effect*; (b) *indirect effect*; dan (c) *total effect*.

1) *Direct Effects* (Pengaruh Langsung)

Tujuan analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk pengujian hipotesis *direct effect* adalah seperti terlihat di dalam bagian di bawah ini. Pertama, koefisien jalur (*path coefficient*): (a) Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik; dan (b) Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah. Kedua, nilai

probabilitas/signifikansi (*P-Value*): (1) Jika nilai *P-Values* < 0.05 , maka signifikan; dan (2) Jika nilai *P- Values* > 0.05 , maka tidak signifikan (Juliandi, 2018).

2) *Indirect Effect* (Pengaruh Tidak Langsung)

Tujuan analisis *indirect effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator) (Juliandi, 2018). Kriteria menentukan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) (Juliandi, 2018) adalah : (1) jika nilai *P-Values* < 0.05 , maka signifikan, artinya variabel mediator (Z) memediasi pengaruh variabel eksogen (X_1) dan (X_2) terhadap variabel endogen (Y). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung dan (2) jika nilai *P-Values* > 0.05 , maka tidak signifikan artinya variabel mediator (Z) tidak memediasi pengaruh variabel eksogen (X_1) dan (X_2) terhadap variabel endogen (Y). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung.

3) *Total Effect* (Pengaruh Total)

Total effect merupakan total dari *direct effect* (pengaruh langsung) dan *indirect effect* (pengaruh tidak langsung) (Juliandi, 2018).

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medang Deras. Dalam penelitian ini penulis mengolah angket dalam bentuk data yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel pembangunan desa (Y), 4 pernyataan untuk variabel transparansi (X1), 4 pernyataan untuk variabel akuntabilitas (X2), dan 4 pernyataan untuk variabel partisipasi masyarakat (Z). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada perangkat desa di Kecamatan Medang Deras yang berjumlah 72 orang sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan skala likert dengan 5 (lima) opsi sebagai berikut:

Tabel 4.1. Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak setuju	1

Ketentuan diatas berlaku dalam menghitung variabel X, Y dan Z. Jadi untuk setiap responden yang menjawab angket maka skor tertinggiya adalah 5 dan skor terendah adalah 1.

4.1.2 Identitas Responden

Data di dalam tabel-tabel dibawah ini menunjukkan identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir lama bekerja dan status pernikahan.

4.1.2.1 Nama Desa

Identitas responden berdasarkan nama desa dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Nama Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Aek Nauli	4	5.6	5.6	5.6
	Durian	4	5.6	5.6	11.1
	Lalang	4	5.6	5.6	16.7
	Medang	4	5.6	5.6	22.2
	Pakam	4	5.6	5.6	27.8
	Pakam Raya	4	5.6	5.6	33.3
	Pematang Cengkering	4	5.6	5.6	38.9
	Sei Buah Keras	4	5.6	5.6	44.4
	Sei Rakyat	4	5.6	5.6	50.0
	Sidmulyo	4	5.6	5.6	55.6
	Tanjung Sigoni	4	5.6	5.6	61.1
	Nenas Siam	4	5.6	5.6	66.7
	Pakam Raya Selatan	4	5.6	5.6	72.2
	Mandarsah	4	5.6	5.6	77.8
	Medang Baru	4	5.6	5.6	83.3
	Pematang Nibung	4	5.6	5.6	88.9
	Cengkering Pekan	4	5.6	5.6	94.4
	Sei Raja	4	5.6	5.6	100.0
Total	72	100.0	100.0		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 18 desa yang terdiri dari masing-masing desa diambil 4 perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Dan Administrasi Desa.

4.1.2.2 Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	48	66.7	66.7	66.7
	Perempuan	24	33.3	33.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 48 (66,7%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 24 (33,3%) orang. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa Kecamatan Medang Deras yang berjenis kelamin laki-laki.

4.1.2.3 Pendidikan Terakhir

Adapun identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	46	63.9	63.9	63.9
	Sarjana	17	23.6	23.6	87.5
	Magister	9	12.5	12.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 46 (65%) orang perangkat desa yang berlatar pendidikan SMA/SMK, 17 (23,6%) orang perangkat desa yang berlatar pendidikan Sarjana, dan 9 (12%) orang perangkat yang berlatar pendidikan Magister. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa yang berlatar pendidikan SMA/SMK.

4.1.2.4 Jabatan

Adapun identitas responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Desa	18	25.0	25.0	25.0
	Sekretaris Desa	18	25.0	25.0	50.0
	Bendahara	18	25.0	25.0	75.0
	Administrasi Desa	18	25.0	25.0	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.5 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari masing-masing 18 orang yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan administrasi desa.

4.1.2.5 Lama Bekerja

Adapun identitas responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	26	36.1	36.1	36.1
	5-10 Tahun	33	45.8	45.8	81.9
	> 10 Tahun	13	18.1	18.1	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.6 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 33 (45,8%) orang perangkat desa yang sudah bekerja selama 5-10 tahun, 26 (36,1%) orang perangkat desa yang sudah bekerja selama 1-10 Tahun, dan 13 (18,1%) orang perangkat desa yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa yang sudah bekerja selama 5-10 tahun.

4.1.3 Analisis Variabel Penelitian

4.1.3.1 Variabel Pembangunan Desa (Y)

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel pembangunan desa sebagai berikut:

Tabel 4.7. Skor Angket Untuk Variabel Pembangunan Desa

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	42	58,3	26	36,1	4	5,6	0	0	0	0	72	100
2	47	65,3	23	31,9	2	2,8	0	0	0	0	72	100
3	47	65,3	19	26,4	2	2,8	4	5,6	0	0	72	100
4	40	55,6	24	33,3	8	11,1	0	0	0	0	72	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari Tabel 4.7 Diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel pembangunan desa Bahwa:

- 1) Jawaban responden pelaksanaan kinerja pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dari perencanaan awal mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 58,3%.
- 2) Jawaban responden pelaksanaan kinerja pembangunan desa dapat menunjang keberlangsungan pembangunan mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 65,3%.
- 3) Jawaban responden adanya dampak langsung dari pelaksanaan kinerja pembangunan desa yang dirasakan masyarakat desa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 65,3%.
- 4) Jawaban responden pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan peraturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat (pengawasan) mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 55,6%.

4.1.3.2 Variabel Transparansi (X1)

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel transparansi sebagai berikut:

Tabel 4.8. Skor Angket Untuk Variabel Transparansi

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	47	65,3	21	29,2	4	5,6	0	0	0	0	72	100
2	45	62,5	19	26,4	4	5,6	4	5,6	0	0	72	100
3	39	54,2	25	34,7	6	8,3	2	2,8	0	0	72	100
4	49	68,1	17	23,6	6	8,3	0	0	0	0	72	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel transparansi bahwa:

- 1) Jawaban responden pemerintah desa selalu menyediakan papan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 65,3%.
- 2) Jawaban responden pemerintah desa selalu melaporkan progres/kemajuan pelaksanaan pengelolaan dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 62,5%.
- 3) Jawaban responden pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam alokasi dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 54,2%.
- 4) Jawaban laporan dana desa mudah di akses bagi masyarakat jika di butuhkan mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 68,1%.

4.1.3.3 Variabel Akuntabilitas (X2)

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel akuntabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.9. Skor Angket Untuk Variabel Akuntabilitas

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	46	63,9	21	29,2	5	6,9	0	0	0	0	72	100
2	45	62,5	20	27,8	7	9,7	0	0	0	0	72	100
3	27	37,5	40	55,6	5	6,9	0	0	0	0	72	100
4	48	66,7	18	25	6	8,3	0	0	0	0	72	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.9 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel akuntabilitas bahwa:

- 1) Jawaban responden pemerintah desa membuat rencana kinerja sebelumnya untuk melihat perkembangan pelaksanaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 63,9%.
- 2) Jawaban responden pemerintah desa menyajikan laporan keuangan dan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 62,5%.
- 3) Jawaban responden pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,6%.
- 4) Jawaban responden penyajian laporan disajikan secara tertulis, tepat waktu dan dapat dipahami mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 66,7%.

4.1.3.4 Variabel Partisipasi Masyarakat (Z)

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel partisipasi masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.10. Skor Angket Untuk Variabel Partisipasi Masyarakat

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	43	59,7	25	34,7	4	5,6	0	0	0	0	72	100
2	47	65,3	23	31,9	2	2,8	0	0	0	0	72	100
3	45	62,5	21	29,2	2	2,8	4	5,6	0	0	72	100
4	42	58,3	24	33,3	6	8,3	0	0	0	0	72	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2024)

Dari tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel partisipasi masyarakat bahwa:

- 1) Jawaban responden masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebesar 59,7%.
- 2) Jawaban responden masyarakat terlibat secara aktif mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 65,3%.
- 3) Jawaban responden masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pengelolaan dana desa responden menjawab sangat setuju sebesar 62,5%.
- 4) Jawaban responden masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program pengelolaan dana desa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 58,3%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Model Pengukuran/*Measurement Model Analysis (Outer Model)*

Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan 4 pengujian, antara lain: *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *cronbach alpha* berikut ini hasil pengujiannya:

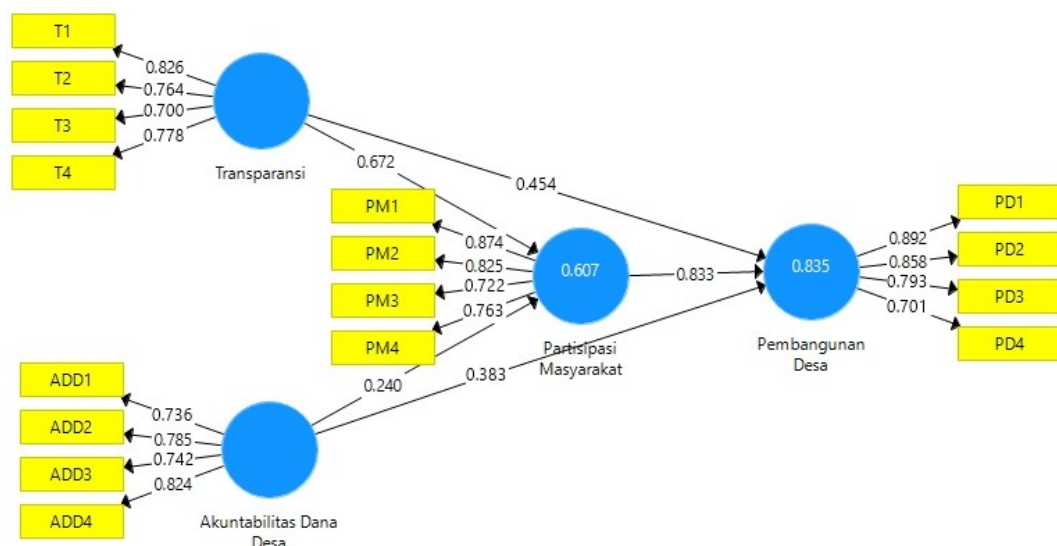
4.2.1.1 Convergent Validity

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang diukur. Namun menurut (Ghozali, 2013) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5-0,6 dianggap cukup memadai.

Tabel 4.11. Outer Loading

	Akuntabilitas Dana Desa	Partisipasi Masyarakat	Pembangunan Desa	Transparansi
ADD1	0,736			
ADD2	0,785			
ADD3	0,742			
ADD4	0,824			
PD1			0,892	
PD2			0,858	
PD3			0,793	
PD4			0,701	
PM1		0,874		
PM2		0,825		
PM3		0,722		
PM4		0,763		
T1				0,826
T2				0,764
T3				0,700
T4				0,778

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)



Gambar 4.1. Hasil Uji Algorithm (Outer Loading)
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Kesimpulan pengujian *convergent validity* adalah seluruh nilai *loading* di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwasanya seluruh nilai *loading* sudah memadai.

4.2.1.2 *Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur *reliabilitas component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

Tabel 4.12. *Average Variance Extracted (AVE)*

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Dana Desa	0,528
Partisipasi Masyarakat	0,506
Pembangunan Desa	0,596
Transparansi	0,539

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai AVE (*Average Variance Extracted*) untuk semua konstruk memiliki nilai $> 0,50$. Oleh karena itu tidak ada permasalahan *discriminant validity* pada model yang diuji.

4.2.1.3 *Cronbach Alpha*

Cronbach alpha harus $> 0,70$ untuk *confirmatory research*, dan $> 0,53$ masih dapat diterima untuk *exploratory research* (Hair et al., 2021).

Tabel 4.13. *Cronbach Alpha*

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Dana Desa	0,704
Partisipasi Masyarakat	0,753
Pembangunan Desa	0,744
Transparansi	0,704

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Dengan melihat nilai *cronbach alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk dapat disimpulkan dari tabel di atas seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang sudah sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

4.2.1.4 Composite Reliability

Composite reliability harus > 0.70 untuk *confirmatory research*, 0.53-0.70 masih dapat diterima untuk *exploratory research* (Hair et al., 2021).

Tabel 4.14. Composite Reliability

	Composite Reliability
Akuntabilitas Dana Desa	0,815
Partisipasi Masyarakat	0,787
Pembangunan Desa	0,734
Transparansi	0,741

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Tabel di atas menunjukkan nilai *composite reliability* untuk semua konstruk berada di atas nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

4.2.2 Analisis Model Struktural / *Structural Model Analysis (Inner Model)*

Analisis model structural menggunakan 3 pengujian, antara lain: (1) *R-Square*; (2) *F-Square*; (3) *Hypothesis Test*: Berikut ini hasil pengujiannya:

4.2.2.1 *R-Square*

Kriteria dari *R-Square* adalah: (1) jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018).

Tabel 4.15. *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Partisipasi Masyarakat	0,607	0,596
Pembangunan Desa	0,835	0,827

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Kesimpulan dari pengujian nilai R-square Tabel 4.15 adalah sebagai berikut: *R-Square Adjusted* model jalur I = 0.827 Artinya kemampuan variabel X yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan Y (pembangunan desa) adalah sebesar 82,7% dengan demikian model tergolong kuat; *R-Square Adjusted* model jalur II = 0.596. Artinya kemampuan variabel X yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan Z (partisipasi masyarakat) adalah sebesar 59,6% dengan demikian model tergolong sedang.

4.2.2.2 *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018).

Kriteria *F-Square* menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen; (2) Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan (3) Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.16. *F-Square*

	Partisipasi Masyarakat	Pembangunan Desa
Akuntabilitas Dana Desa	0,133	0,033
Partisipasi Masyarakat		1,650
Pembangunan Desa		
Transparansi	1,042	0,368

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Kesimpulan nilai *F-Square* dapat dilihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel X1 (transparansi) terhadap Y (pembangunan desa) memiliki nilai = 0,368, maka efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 2) Variabel X2 (akuntabilitas) terhadap Y (pembangunan desa) memiliki nilai = 0,033, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 3) Variabel X1 (transparansi) terhadap Z (partisipasi masyarakat) memiliki nilai = 1,042, maka efek yang besar dari variabel eksogen terhadap mediator.
- 4) Variabel X2 (akuntabilitas) terhadap Z (partisipasi masyarakat) memiliki nilai = 0,133, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap mediator.
- 5) Variabel Z (partisipasi masyarakat) terhadap Y (pembangunan desa) memiliki nilai = 1,650, maka efek yang besar dari variabel mediator terhadap endogen.

4.2.2.3 Pengujian Hipotesis

1) *Direct Effects (Pengaruh Langsung)*

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis. Jika nilai P-Values < 0.05, maka signifikan; dan Jika nilai P- Values > 0.05, maka tidak signifikan (Juliandi, 2018).

Tabel 4.17. *Direct Effect*

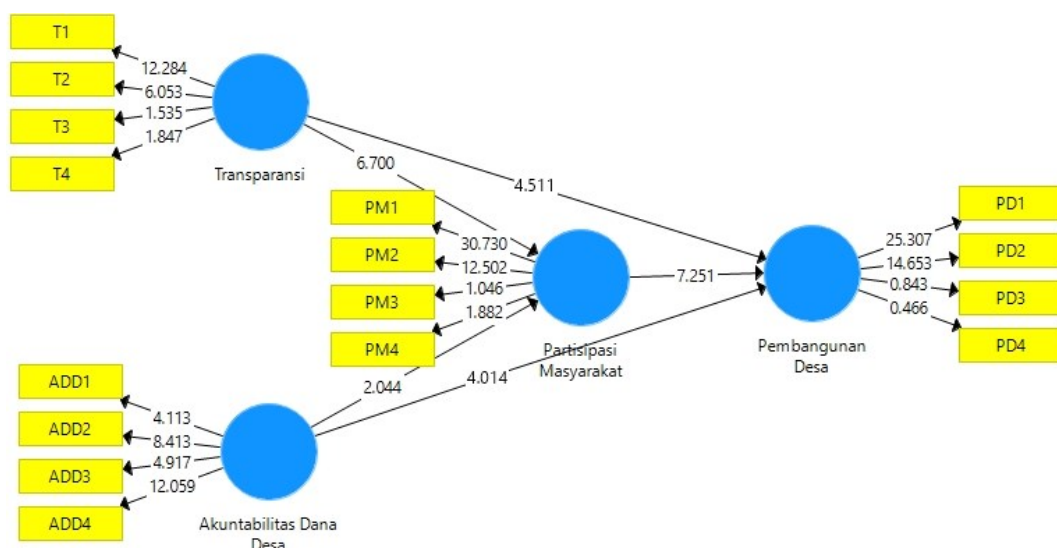
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat	0,240	0,264	0,117	2,044	0,041
Akuntabilitas Dana Desa -> Pembangunan Desa	0,383	0,370	0,182	4,014	0,000
Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,833	0,874	0,115	7,251	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat	0,672	0,671	0,100	6,700	0,000
Transparansi -> Pembangunan Desa	0,454	0,416	0,105	4,511	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Koefisien jalur (*path coefficient*) dalam Tabel di atas memperlihatkan bahwa seluruh nilai koefisien jalur adalah positif (dilihat pada

$TStatistic(|O/STDEV|)$), antara lain:

- 1) X1 terhadap Y : nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 4,511$ dan $P-Value = 0,000 < 0,05$ artinya, pengaruh X1 (transparansi) terhadap Y (pembangunan desa) adalah positif dan signifikan.
- 2) X2 terhadap Y : nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 4,014$ dan $P-Value = 0,000 < 0,05$ artinya, pengaruh X2 (akuntabilitas) terhadap Y (pembangunan desa) adalah positif dan signifikan.
- 3) X1 terhadap Z : nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 6,700$ dan $P-Value = 0,000 < 0,05$ artinya, pengaruh X1 (transparansi) terhadap Z (partisipasi masyarakat) adalah positif dan signifikan.
- 4) X2 terhadap Z : nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 2,044$ dan $P-Value = 0,041 < 0,05$ artinya, pengaruh X2 (akuntabilitas) terhadap Z (partisipasi masyarakat) adalah positif dan signifikan.
- 5) Z terhadap Y : nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 7,251$ dan $P-Values = 0,000 < 0,05$, artinya, pengaruh Z (partisipasi masyarakat) terhadap Y (pembangunan desa) adalah positif dan signifikan.



Gambar 4.2. Hasil Uji Bootstrapping (Direct Effect)
Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

2) *Indirect Effect* (Pengaruh Tidak Langsung)

Tujuan analisis *indirect effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator) (Juliandi, 2018). Kriteria menentukan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) (Juliandi, 2018) adalah:

- 1) Jika nilai *P-Values* < 0.05, maka signifikan, artinya variabel mediator (Z/partisipasi masyarakat), memediasi pengaruh variabel eksogen (X1/transparansi) dan (X2/akuntabilitas) terhadap variabel endogen (Y/pembangunan desa).
- 2) Jika nilai *P-Values* > 0.05, maka tidak signifikan, artinya variabel mediator Z/partisipasi masyarakat), tidak memediasi pengaruh variabel eksogen (X1/transparansi) dan (X2/akuntabilitas) terhadap variabel endogen (Y/pembangunan desa).

Tabel 4.18. *Indirect Effect*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,400	0,335	0,112	3,782	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,560	0,587	0,123	4,547	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Dengan demikian, dapat disimpulkan nilai *indirect effect* yang terlihat pada tabel 4.18 yaitu:

- 1) Pengaruh tidak langsung (X1) -> (Z) -> (Y) nilai *TStatistics(|O/STDEV|)* adalah 4,547 dengan *P-Values* 0,000 < 0,05 (signifikan), maka partisipasi masyarakat memediasi pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa.

2) Pengaruh tidak langsung (X2) -> (Z) -> (Y) nilai $TStatistics(|O/STDEV|)$ adalah 3,782 dengan $P-Values$ $0,000 < 0,05$ (signifikan), maka partisipasi masyarakat memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa.

3) Total Effect (Pengaruh Total)

Total effect (total efek) merupakan total dari *direct effect* (pengaruh langsung) dan *indirect effect* (pengaruh tidak langsung) (Juliandi, 2018).

Tabel 4.19. Total Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat	0,240	0,264	0,117	2,044	0,041
Akuntabilitas Dana Desa -> Pembangunan Desa	0,282	0,305	0,098	2,894	0,004
Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,833	0,874	0,115	7,251	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat	0,672	0,671	0,100	6,700	0,000
Transparansi -> Pembangunan Desa	0,614	0,603	0,103	5,954	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3 (2024)

Kesimpulan dari nilai pengaruh total pada tabel di atas adalah:

- 1) *Total effect* untuk hubungan X1 (transparansi) dan Y (pembangunan desa) nilai $TStatistics(|O/STDEV|)$ adalah sebesar 5,954 dengan $P-Values$ $0,000 < 0,05$ (berpengaruh signifikan).
- 2) *Total effect* untuk hubungan X2 (akuntabilitas) dan Y (pembangunan desa) nilai $TStatistics(|O/STDEV|)$ adalah sebesar 2,894 dengan $P-Values$ $0,004 < 0,05$ (berpengaruh signifikan).
- 3) *Total effect* untuk hubungan X1 (transparansi) dan Z (partisipasi masyarakat) nilai $TStatistics(|O/STDEV|)$ adalah sebesar 6,700 dengan $P-Values$ $0,000 < 0,05$ (berpengaruh signifikan).
- 4) *Total effect* untuk hubungan X2 (akuntabilitas) dan Z (partisipasi masyarakat) nilai $TStatistics(|O/STDEV|)$ adalah sebesar 2,044 dengan $P-$

Values $0,041 < 0,05$ (berpengaruh signifikan).

- 5) *Total effect* untuk hubungan Z (partisipasi masyarakat) dan Y (pembangunan desa) nilai *TStatistics(|O/STDEV|)* adalah sebesar 7,251 dengan *P-Values* $0,000 < 0,05$ (berpengaruh signifikan).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa, X1 terhadap Y dengan nilai *TStatistics(|O/STDEV|)* = 4,511 dan *P- Values* $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pembangunan desa.

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan (Sugista, 2017).

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa, X2 terhadap Y dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 4,014$ dan $P-Values$ 0,000 dengan taraf signifikan $0,000 < 0.05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap pembangunan desa.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya Mardiasmo (2012). Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari peyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab sebuah pimpinan selaku pemilik wewenang untuk mengelola sumberdaya publik. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama (Dewi & Sapari, 2020).

4.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat, X1 terhadap Z dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) =$

6,700 dan *P- Values* 0,000 dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara transparansi terhadap partisipasi masyarakat.

Transparansi adalah suatu prinsip yang dapat menjamin kebebasan dalam mengakses dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah oleh setiap masyarakat Sujarweni (2015). Djumadi dan Paranoan (2015), dalam penelitian menyebutkan bahwa analisis faktor-faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa yang menunjukkan bahwa transparansi dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah desa (Firdaus et al., 2020).

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat bervariasi, dan dalam konteks dana desa, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dana (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023). Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga mencakup pengidentifikasian masalah dan potensi dalam masyarakat. Partisipasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan berikutnya. Pada konteks ini, konsep "bottom-up" yang terlihat dalam pengelolaan dana desa menunjukkan adopsi prinsip-prinsip pembangunan dari bawah. Ini sesuai dengan teori pembangunan bawah ke atas yang menekankan bahwa pembangunan yang berhasil dimulai dengan memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Sub-

district & Regency, 2024).

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat, X2 terhadap Z dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 2,044$ dan $P-Values$ 0,041 dengan taraf signifikan $0,041 < 0.05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas pada dana desa merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa selaku pelaku administrasi dan juga pengelola dana desa Putri et al., (2021). Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa dapat digunakan secara efektif, efisien dan terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana.

Hasil penelitian yang dilakukan Syafii et al.,(2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat diperkuat oleh Yupita & Juita,(2020) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Amari, 2023).

4.3.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, Z terhadap Y dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 7,251$ dan $P-Values$ 0,000 dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasian permasalahan dan potensi yng ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012). Partisipasi masyarakat juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi (Adi, 2007:27)(Umaira & Adnan, 2019)

Pelaksanaan untuk kemajuan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dari perencanaan, diharapkan kebutuhan dan ide masyarakat dapat disalurkan dan dipenuhi dengan baik (Akuntansi et al., 2024).

4.3.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat, X1 terhadap Y melalui Z dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 4,547$ dan $P-Values$ 0,000 dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pembangunan desa melalui

partisipasi masyarakat. Hal ini berarti variabel mediasi (partisipasi masyarakat) menjadi mediator antara transparansi dengan pembangunan desa.

Transparansi, aspek penting yang dapat mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik dan dapat memajukan desa. Menurut hasil penelitian Siregar (2020), Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan desa.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer dan tahap akuntabilitas juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa (Transparansi et al., 2023).

4.3.7 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat, X_2 terhadap Y melalui Z dengan nilai $TStatistics(|O/STDEV|) = 3,782$ dan $P-Values$ 0,000 dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat. Hal ini berarti variabel mediasi (partisipasi masyarakat) menjadi mediator antara akuntabilitas dengan pembangunan desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian yang dilakukan Atmadjaya dan Saputra (2018), dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala

desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya. Pengelolaan keuangan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Tumbel, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Kazimoto (2013) yang menyatakan laporan keuangan yang dihasilkan dan didistribusikan kepada anggota masyarakat tidak menunjukkan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan keuangan telah melibatkan masyarakat. Penelitian Kazimoto (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum memiliki efek positif bagi kinerja organisasi (Irma, 2022).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dari responden yang berjumlah 72 orang, kemudian telah di analisa, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.
3. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.
4. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.
5. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Kecamatan Medang Deras.
6. Transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.
7. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat pada Kecamatan Medang Deras.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pengawasan ketat dan audit secara berkala oleh pihak eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBDes. Buat sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi masyarakat dan perangkat desa untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tanpa takut akan balasan.
2. Publikasikan laporan keuangan dan pengelolaan dana desa secara rutin di media lokal, papan pengumuman desa, dan website resmi desa. Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan desa untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga.
3. Sediakan akses informasi yang mudah dan terbuka mengenai proyek pembangunan desa, termasuk anggaran, jadwal, dan progres pelaksanaan. Buat laporan tahunan yang rinci dan sosialisasikan kepada masyarakat melalui pertemuan umum, brosur, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat untuk diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam faktor mempengaruhi pembangunan desa hanya menggunakan faktor transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, variabel partisipasi masyarakat digunakan sebagai variabel mediasi sedangkan masih banyak

faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa.

2. Fokus penelitian yang terbatas pada Kecamatan Medang Deras mungkin tidak mencerminkan situasi dan kondisi di wilayah lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat diaplikasikan secara langsung ke daerah lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal yang berbeda.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden serta faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2019). Faktor-Faktor Kualitas Pemeriksaan Pada Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara. *Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 129-138.
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103-114.
- Adib, M. (2021). Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Rempoah. *Jurnal Pembangunan Desa*, 1(6), 1-10
- Armainsi, R. (2017). Asas- asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57–67.
- Aziiz, N. M., dan Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Caniago, H. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Balmera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 80–88.
- Cahyaningrum, F. M., & Ariani, K. R. (2022). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo). *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian (SNHRP)*, 4, 300-308.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dzulkifli, M., Furqan, A. C., & Betty, B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 12(7), 9–18.

- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardianto, H. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275.
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72-98.
- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sienreng Rappang. *Jurnal politik dan sosial*, 2(2), 56–62.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(03), 87–101.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Irma, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13.
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147.
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-PLS) Menggunakan Smartpls*. Batam: Universitas Batam.

- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung pintareng kecamatan tabukan selatan tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 1-24.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–370.
- Korwa, J. C. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Program Anggaran Dana Desa Di Desa Duai Distrik Bruyadori Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90), 1-13.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 150-158
- Murni, S., Analiansyah, A., & Baihaqqi, B. (2020). Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44-55.
- Nissa, F., Astuti, W., & Sari, E. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 169-179.
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 129-136.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 3(1) 31–41.
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 400–411.

- Pidarta, M. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan. *Jurnal Partisipasi*, 6(1)31–32.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Putra, R. A. S., Astuty, W., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh Debt Default, Kondisi Keuangan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 1-14.
- Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10.
- Sari, M. & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–311.
- Sari, P. P. dan L. B. (2018). Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Interaksi*, 2(1), 47–60.
- Setiawati, L. C. (2020). Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa SKO Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kuantan. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 619-633.

- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268.
- Sub-district, K. B., & Regency, B. B. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango , Kecamatan Kabila Bone , Kabupaten Bone Bolango Community Participation in Village Fund Management in Biluango Village . *Dynamics of Rural Society Journal*, 02(1), 1–10.
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Regional Financial Management at the Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1) 1-10.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-10.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Zakariya, R. (2020). Public Participation in Village Fund Corruption Prevention Policy: Scheme Detection. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263–282.

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KECAMATAN MEDANG DERAS**

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Responden
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak) jurusan akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Medan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tanggapan terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai topik **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras”**, Adapun pengumpulan data ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan akademis dan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini, data dalam kuesioner akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis. Terkhususnya untuk kepala desa dan perangkat Desa, Kecamatan Medang Deras kabupaten Batu Bara. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu/saudara/i yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Medan, 2024

Wiwi Tresya Pardede

KUESIONER PENELITIAN

A. DATA IDENTITAS RESPONDEN

1. No Responden :..... (Di isi oleh peneliti)
2. Namat desa :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Jabatan :
6. Lama bekerja :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Kepada bapak/ibu/saudara/i diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya pada kenyataan.
2. Barilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan bapak/ibu/saudara/i pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi dearajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori	Bobot /Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

1. TRANSPARANSI (X1)

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah desa selalu menyediakan papan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa					
2	Pemerintah desa selalu melaporkan progres/kemajuan pelaksanaan pengelolaan dana desa					
3	Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam alokasi dana desa					
4	Laporan dana desa mudah di akses bagi masyarakat jika di butuhkan					

2. AKUNTABILITAS DANA DESA (X2)

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah desa membuat rencana kinerja sebelumnya untuk melihat perkembangan pelaksanaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa					
2	Pemerintah desa menyajikan laporan keuangan dan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban					
3	Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku					
4	Penyajian laporan disajikan secara tertulis, tepat waktu dan dapat dipahami					

3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Z)

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan dana desa					
2	Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
3	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pengelolaan dana desa					
4	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program pengelolaan dana desa					

4. PEMBANGUNAN DESA (Y)

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pelaksanaan kinerja pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dari perencanaan awal					
2	Pelaksanaan kinerja pembangunan desa dapat menunjang keberlangsungan pembangunan					
3	Adanya dampak langsung dari pelaksanaan kinerja pembangunan desa yang dirasakan masyarakat desa					
4	Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan peraturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat (Pengawasan)					

Distribusi Jawaban Responden

TRANSPARANSI					
		X1	X2	X3	X4
N	Valid	72	72	72	72
	Missing	0	0	0	0

X1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Setuju	21	29.2	29.2	34.7
	Sangat setuju	47	65.3	65.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Kurang setuju	4	5.6	5.6	11.1
	Setuju	19	26.4	26.4	37.5
	Sangat setuju	45	62.5	62.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	2.8	2.8	2.8
	Kurang setuju	6	8.3	8.3	11.1
	Setuju	25	34.7	34.7	45.8
	Sangat setuju	39	54.2	54.2	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	6	8.3	8.3	8.3
	Setuju	17	23.6	23.6	31.9
	Sangat setuju	49	68.1	68.1	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

AKUNTABILITAS DANA DESA					
		X1	X2	X3	X4
N	Valid	72	72	72	72
	Missing	0	0	0	0

X1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	5	6.9	6.9	6.9
	Setuju	21	29.2	29.2	36.1
	Sangat setuju	46	63.9	63.9	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	7	9.7	9.7	9.7
	Setuju	20	27.8	27.8	37.5
	Sangat setuju	45	62.5	62.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	5	6.9	6.9	6.9
	Setuju	40	55.6	55.6	62.5
	Sangat setuju	27	37.5	37.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

X4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	6	8.3	8.3	8.3
	Setuju	18	25.0	25.0	33.3
	Sangat setuju	48	66.7	66.7	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

PARTISIPASI MASYARAKAT					
		Z1	Z2	Z3	Z4
N	Valid	72	72	72	72
	Missing	0	0	0	0

Z1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Setuju	25	34.7	34.7	40.3
	Sangat setuju	43	59.7	59.7	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Z2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	2	2.8	2.8	2.8
	Setuju	23	31.9	31.9	34.7
	Sangat setuju	47	65.3	65.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Z3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Kurang setuju	2	2.8	2.8	8.3
	Setuju	21	29.2	29.2	37.5
	Sangat setuju	45	62.5	62.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Z4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	6	8.3	8.3	8.3
	Setuju	24	33.3	33.3	41.7
	Sangat setuju	42	58.3	58.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

PEMBANGUNAN DESA					
		Y1	Y2	Y3	Y4
N	Valid	72	72	72	72
	Missing	0	0	0	0

Y1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Setuju	26	36.1	36.1	41.7
	Sangat setuju	42	58.3	58.3	100.0

	Total	72	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

Y2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	2	2.8	2.8	2.8
	Setuju	23	31.9	31.9	34.7
	Sangat setuju	47	65.3	65.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Y3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	4	5.6	5.6	5.6
	Kurang setuju	2	2.8	2.8	8.3
	Setuju	19	26.4	26.4	34.7
	Sangat setuju	47	65.3	65.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Y4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	8	11.1	11.1	11.1
	Setuju	24	33.3	33.3	44.4
	Sangat setuju	40	55.6	55.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Nama Desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Aek Nauli	4	5.6	5.6	5.6
	Durian	4	5.6	5.6	11.1
	Lalang	4	5.6	5.6	16.7
	Medang	4	5.6	5.6	22.2
	Pakam	4	5.6	5.6	27.8
	Pakam Raya	4	5.6	5.6	33.3
	Pematang Cengkering	4	5.6	5.6	38.9
	Sei Buah Keras	4	5.6	5.6	44.4
	Sei Rakyat	4	5.6	5.6	50.0
	Sidmulyo	4	5.6	5.6	55.6
	Tanjung Sigoni	4	5.6	5.6	61.1
	Nenas Siam	4	5.6	5.6	66.7
	Pakam Raya Selatan	4	5.6	5.6	72.2

	Mandarsah	4	5.6	5.6	77.8
	Medang Baru	4	5.6	5.6	83.3
	Pematang Nibung	4	5.6	5.6	88.9
	Cengkering Pekan	4	5.6	5.6	94.4
	Sei Raja	4	5.6	5.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	48	66.7	66.7	66.7
	Perempuan	24	33.3	33.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA.SMK	46	63.9	63.9	63.9
	Sarjana	17	23.6	23.6	87.5
	Magister	9	12.5	12.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

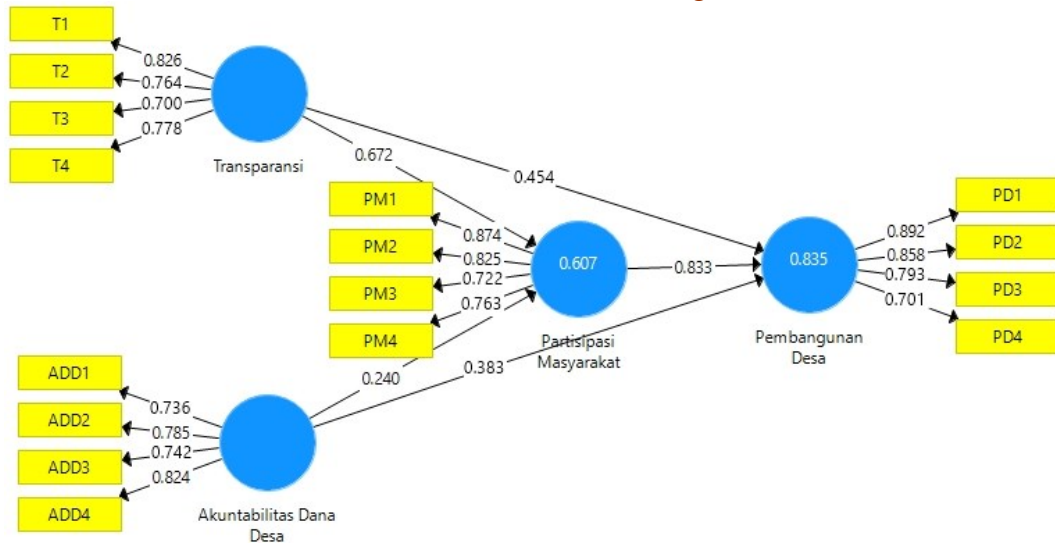
Jabatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Desa	18	25.0	25.0	25.0
	Sekretaris Desa	18	25.0	25.0	50.0
	Bendahara	18	25.0	25.0	75.0
	Administrasi Desa	18	25.0	25.0	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Lama Bekerja					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	26	36.1	36.1	36.1
	5-10 Tahun	33	45.8	45.8	81.9
	> 10 Tahun	13	18.1	18.1	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Gambar Outer Loadings



Tabel Outer Loadings

	Akuntabilitas Dana Desa	Partisipasi Masyarakat	Pembangunan Desa	Transparansi
ADD1	0,736			
ADD2	0,785			
ADD3	0,742			
ADD4	0,824			
PD1			0,892	
PD2			0,858	
PD3			0,793	
PD4			0,701	
PM1		0,874		
PM2		0,825		
PM3		0,722		
PM4		0,763		
T1				0,826
T2				0,764
T3				0,700
T4				0,778

Discriminant Validity

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Dana Desa	0,528
Partisipasi Masyarakat	0,506
Pembangunan Desa	0,596
Transparansi	0,539

Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Dana Desa	0,704
Partisipasi Masyarakat	0,753
Pembangunan Desa	0,744
Transparansi	0,704

Composite Reliability

	Composite Reliability
Akuntabilitas Dana Desa	0,815
Partisipasi Masyarakat	0,787
Pembangunan Desa	0,734
Transparansi	0,741

Analisis Model Struktural (Inner Model)

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Partisipasi Masyarakat	0,607	0,596
Pembangunan Desa	0,835	0,827

F Square

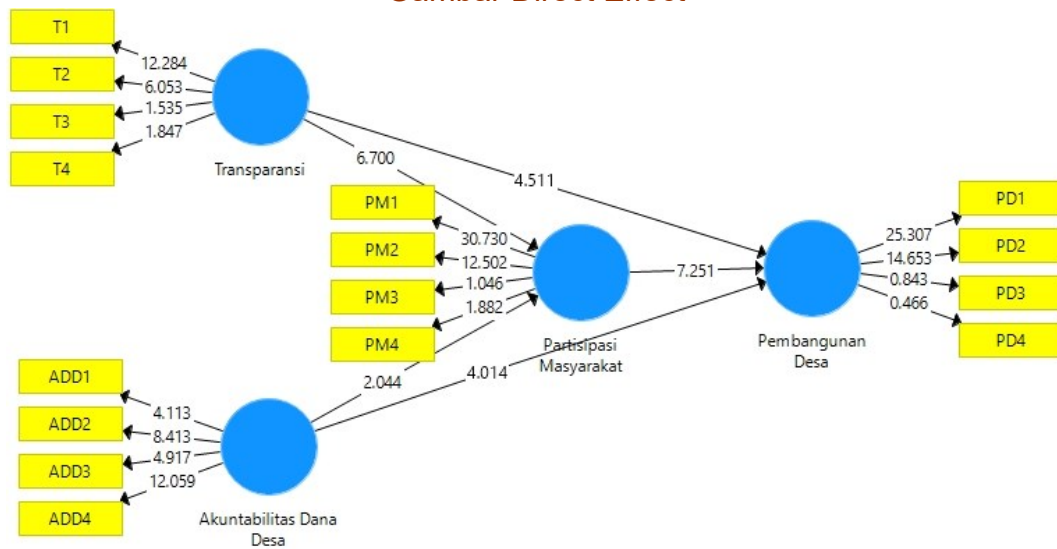
	Partisipasi Masyarakat	Pembangunan Desa
Akuntabilitas Dana Desa	0,133	0,033
Partisipasi Masyarakat		1,650
Pembangunan Desa		
Transparansi	1,042	0,368

Pengujian Hipotesis

Direct Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat	0,240	0,264	0,117	2,044	0,041
Akuntabilitas Dana Desa -> Pembangunan Desa	0,383	0,370	0,182	4,014	0,000
Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,833	0,874	0,115	7,251	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat	0,672	0,671	0,100	6,700	0,000
Transparansi -> Pembangunan Desa	0,454	0,416	0,105	4,511	0,000

Gambar Direct Effect



Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,400	0,335	0,112	3,782	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,560	0,587	0,123	4,547	0,000

Total Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Dana Desa -> Partisipasi Masyarakat	0,240	0,264	0,117	2,044	0,041
Akuntabilitas Dana Desa -> Pembangunan Desa	0,282	0,305	0,098	2,894	0,004
Partisipasi Masyarakat -> Pembangunan Desa	0,833	0,874	0,115	7,251	0,000
Transparansi -> Partisipasi Masyarakat	0,672	0,671	0,100	6,700	0,000
Transparansi -> Pembangunan Desa	0,614	0,603	0,103	5,954	0,000

Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden

T1	T2	T3	T4	ADD1	ADD2	ADD3	ADD4	PM1	PM2	PM3	PM4	PD1	PD2	PD3	PD4
5	5	2	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	3	4	5	5	3
5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4
5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	3	5
5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4
5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	3
4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	5	4	3	4	5	4
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	2	4	4	5	2	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	5	5	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	3
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2	4	5	5	2	4
5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	3	4	4	5
3	4	3	5	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5
4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	3	5	4	5	4	5	3	4	5	5	5	4	4	5	4
3	5	5	5	3	3	3	3	5	5	4	5	4	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
5	5	2	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4
5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	3
5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4
5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4

5	3	3	5	4	5	4	5	5	5	4	3	5	5	4	3
4	5	5	5	4	3	4	5	3	4	5	4	3	4	5	4
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	5	4	3	4	5	2	4	4	5	2	4
5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	5	5	5	5	4	5	4	4	5	3	4	4	5	3
5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	2	4	5	5	2	4
5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	3	5	5	4	5	3	4	4	5	3	4	4	5
3	4	3	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	4	5
4	2	4	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5
5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4
3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	3
5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/11/2002

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 01/11/2002

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wiwi Tresya Pardede
NPM : 2005170143
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 - Apakah pemerintah daerah telah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dalam sistem akuntansi keuangan mereka? - Apakah ada masalah dalam pencatatan, pengklasifikasian, atau pengungkapan transaksi keuangan? - Bagaimana mekanisme pengawasan dan audit terhadap sistem akuntansi keuangan daerah beroperasi, dan apakah mereka efektif dalam mendeteksi pelanggaran atau kesalahan?
Judul 2 - Apakah pajak yang dikenakan pada hotel dan restoran sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah? - Apakah ada masalah dalam administrasi dan penagihan pajak? - Apakah terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan tarif pajak atau ekspansi dalam sektor hotel dan restoran?
Judul 3 - Apakah Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan PBB dengan efisien dan efektif? - Bagaimana pendapatan dari PBB digunakan? - apakah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target?

Rencana Judul : 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
2. Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Adanya Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Pengaruh efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendaptan asli daerah

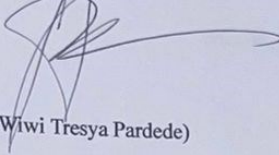
Objek/Lokasi Penelitian : Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Halaman ke

Pemohon



(Wiwi Tresya Pardede)



MSU

Medan, 2024

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

2024

Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : WIWI TRESYA PARDEDE

NPM : 2005170143

Tempat/Tgl Lahir : KAMPUNG KELAPA
01-NOVEMBER-2002

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : KAMPUNG KELAPA

Tempat Penelitian : KECAMATAN MEDANG DERAS

Alamat Penelitian : DANGKALAN DODEK BARU KE
KECAMATAN MEDANG DERAS

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, AK, CPA)

Wassalam
Pemohon

(WIWI TRESYA PARDEDE)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/11/2023

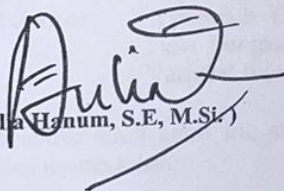
Nama Mahasiswa : Wiwi Tresya Pardede
NPM : 2005170143
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 01/11/2023
Nama Dosen pembimbing*) : M. Firza Alpi, SE., M.Si (10 November 2023)

Judul Disetujui**)

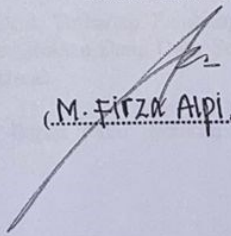
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap
Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat
Dalam pengelolaan Dana Desa sebagai variabel Intervening
pada Kecamatan Medang Deras

Medan, 2024.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zula Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing


(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si.)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 755/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kecamatan Medang Deras
Jln. Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Wiwi Tresya Pardede
Npm : 2005170143
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

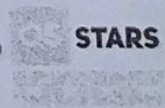


Tembusan :

1. Pertinggal



Dr. H. Januif, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 755/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wiwi Tresya Pardede
N P M : 2005170143
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap
Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada
Kecamatan Medang Deras

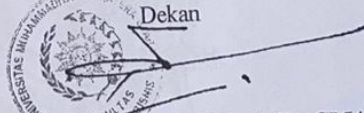
Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Maret 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

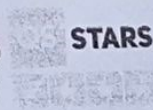
Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN MEDANG DERAS

Jln. Jend. Sudirman No. 54 Kelurahan Pangkalan Dodek Baru
Kode Pos - 21258

Nomor : 202 / 245
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **PERMOHONAN IZIN RISET**

Pangkalan Dodek Baru, 13 Maret 2024
Kepada Yth :
Ketua Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
di -
Medan

Sehubungan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program Sarjana Nomor : 755 / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2024 tanggal 06 Maret
2024 Hal : Permohonan Izin Riset.

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
Prodi : Akuntansi
Judul Tesis : **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa
Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai
Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara.**

Bahwa nama dengan identitas tersebut diatas diberikan izin untuk
melaksanakan Izin Riset di 18 Desa yang ada di Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara

Demikian hal ini kami sampaikan dan perhatian kami ucapkan terima
kasih.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WIWI TRESYA PARDEDE
NPM : 2005170143
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATANG MEDANG DERAS

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- gap, data, fenomena, kecurangan	8/1-2024	
BAB 2	- Huraian Analisis, Perwujudan	5/1-2024	
BAB 3	Populasi dan sampel dari 54 menjadi 72. Populasi	20/1-2024	
Daftar Pustaka	Mendelay	28/1-2024	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC proposal / seminar	4/3-2024	

Medan, Februari 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

ASSOC. PROF. DR. ZULIA HANUM, SE, M.SI

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

M. FIRZA ALPI, SE, M.SI



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 25 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Wiwi Tresya Pardede*
NPM. : 2005170143
Tempat / Tgl.Lahir : *Kampung Kelapa, 01 November 2002*
Alamat Rumah : *Jln. Kapt. Muchatar Basri , Bukit Barisan, gg Pandan*
Judul Proposal : *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Perjelas fenomena</i>
Bab II	<i>kefki pedoman penulisan</i>
Bab III	<i>Metode di sesuai</i>
Lainnya	<i>Campiran Jafa</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 25 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. *Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si*

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Firza Alpi, S.E., M.Si

Pemanding

Hj. Hafsah, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 25 Maret 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Wiwi Tresya Pardede
NPM : 2005170143
Tempat / Tgl.Lahir : Kampung Kelapa, 01 November 2002
Alamat Rumah : Jln. Kapt. Muchatar Basri , Bukit Barisan, gg Pandan
Judul Proposal : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. Firza Alpi, S.E., M.Si*

Medan, 25 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Firza Alpi, S.E., M.Si

Pemanding

Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Wiwi Tresya Pardede
NPM : 2005170143
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi, Skuntabilitas Dana Desa Terhadap
Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang
Deras.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024
Saya yang menyatakan



Wiwi Tresya Pardede



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN MEDANG DERAS
Jln. JENDRAL SUDIRMAN NO. 54 TELP. (0622) - 613100
PANGKALAN DODEK BARU – 21258

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 657 / MD / VI / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRIZAL, SH
NIP : 19681028 198903 1 005
Gol : PEMBINA / IV / a
Jabatan : CAMAT MEDANG DERAS

Yang di bawah ini menerangkan bahwa :

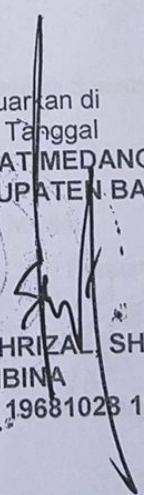
Nama : Wiwi Tresya Pardede
NIM / NPM : 2005170143
Semester : VIII (Delapan)
Progran Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Telah selesai melakukan penelitian terkait Tesis yang berjudul, " Pengaruh Transparasi, Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, " guna menyelesaikan tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat digunakan

Dikeluarkan di : Medang Deras
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

**CAMAT MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA**


SYAHRIZAL SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

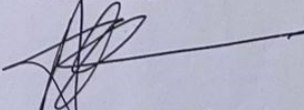
1. Nama : Wiwi Tresya Pardede
NPM : 2005170143
Tempat Tanggal lahir : Batu Bara, 01 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Dusun VIII Jambu, Desa Kampung Kelapa
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : wiwitresyap@gmail.com
HP : 081362901062

2. Nama orang tua
Ayah : Sahlan Pardede
Ibu : Misda Butar-Butar

3. Jenjang Pendidikan
 - SD Negeri 014709 Pematang Panjang 2015
 - SMP Negeri 2 Air Putih 2017
 - SMK Negeri 1 Sei Suka 2020
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 sampai sekarang

Medan, Juli 2024

Hormat Saya



Wiwi Tresya Pardede